

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tercapainya tujuan yang di inginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus di alokasikan secara efektif dan efisien demi peningkatan produksi secara keseluruhan.

Menurut (Sumitro, 1995) pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara kesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri, dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata.

Perkembangan pembangunan suatu daerah sangat di tentukan oleh sumber pendapatannya terutama untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu di perlukan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan dan pembangunan yang diperlukan. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah adanya kendala dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah itu sendiri, untuk pembangunan daerah yang cenderung tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Menyadari bahwa ketergantungan tersebut kurang baik bagi kelanjutan

pelaksanaan pembangunan daerah, maka mengharuskan pemerintah daerah menggali semua sumber ekonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri. Keinginan tersebut ditunjang dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan daerahnya. Berdasarkan aspirasi pemerintah daerah dan diberikan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan sumber keuangan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2009).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan dasar yang ingin dicapai dalam perekonomian suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan. Besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Selanjutnya ada juga

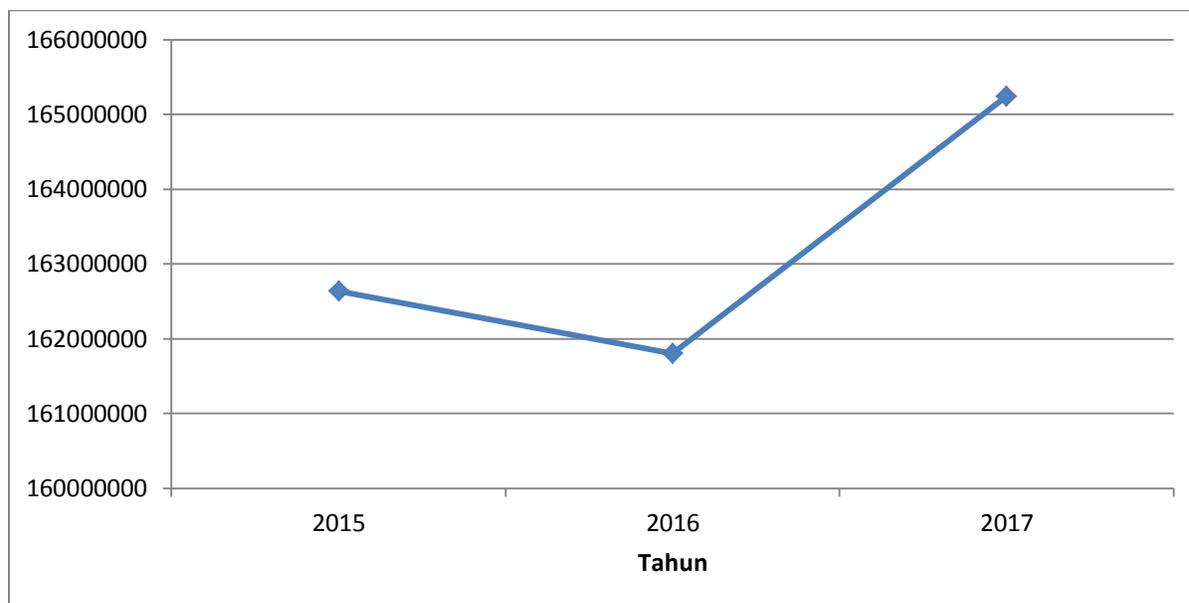
yang disebut PDRB perkapita yaitu secara agregatif untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah, yang dihasilkan melalui perhitungan PDRB tiap wilayah dibagi jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Aziz, 1997).

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan dan fasilitas yang dilaksanakan di daerahnya.

Menurut UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD terdiri dari 1). Pajak Daerah 2). Retribusi Daerah 3). Laba Perusahaan Daerah dan 4). Lain-lain PAD yang sah. Dari sisi penerimaan daerah, penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat selama Periode 2015-2017 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 16.268.235,9 pada tahun 2014 meningkat menjadi

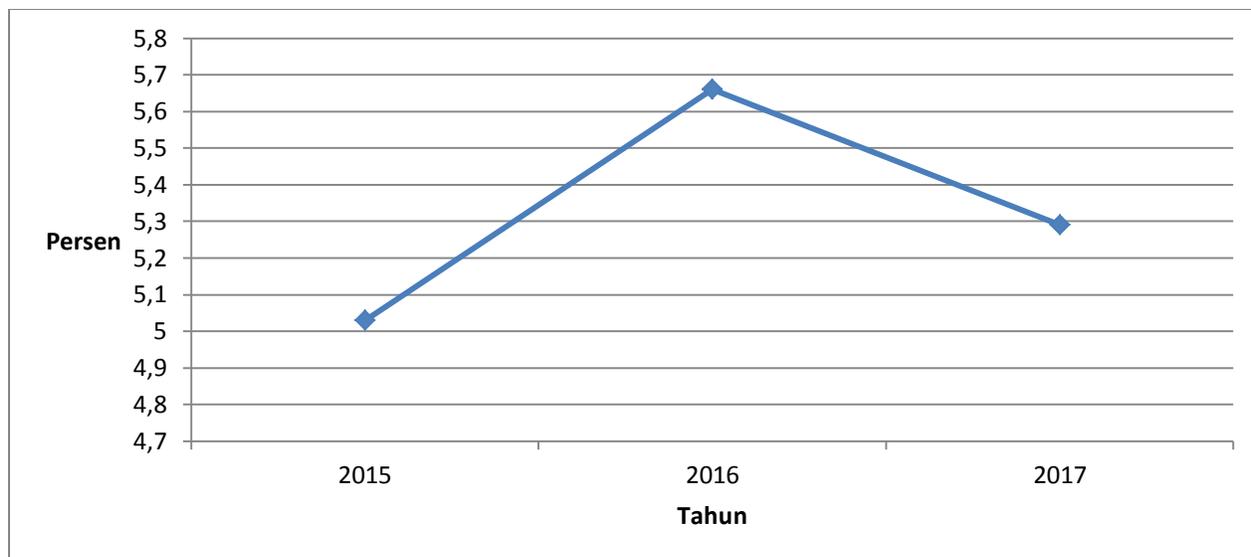
Rp. 16.524.120,9 pada tahun 2017. Perkembangan Realisasi penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Data Realisasi PAD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017
(Dalam Rupiah)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 – 2017, Jawa Barat Dalam Angka dan BPS Provinsi Jawa Barat

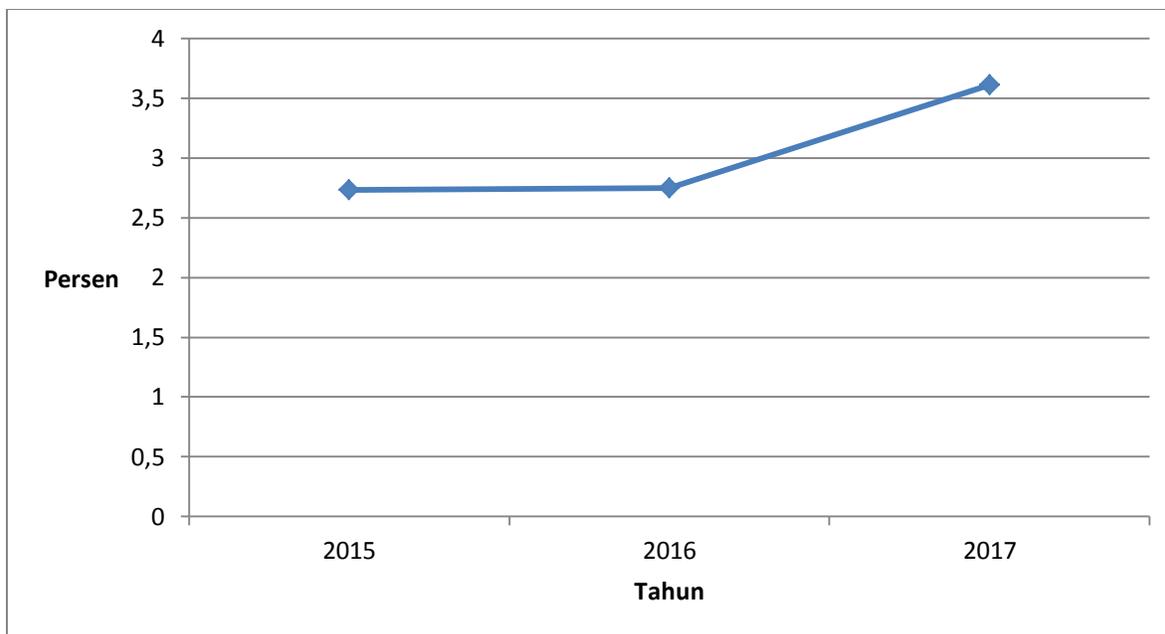
Dilihat dari Tabel 1.1, Data Realisasi dan Target PAD di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun selama tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan dan penurunan. Dan dari Target 2015 sampai 2017 hasilnya mengalami kenaikan, pada tahun 2015 melampaui target sebesar 16.263.235,9 (juta), pada tahun 2016 melampaui target sebesar 16.180.205,5 (juta) dan 2017 melampaui target sebesar 16.524.120,9 (juta). Hal ini tentu berpengaruh terhadap PAD karena merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.2
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017
(Dalam Persentase)

Sumber : Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017

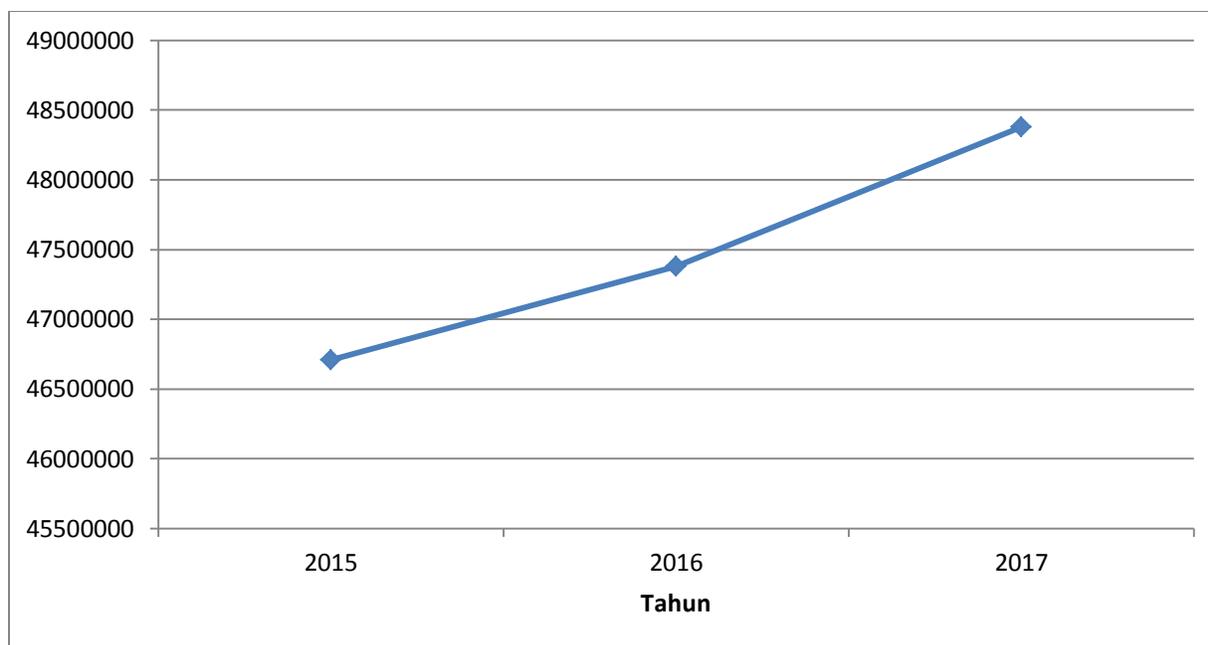
Dilihat dari Tabel 1.2 Data Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 sebesar 5.03 persen dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 5.66 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.29 persen. Hal ini tentu berpengaruh terhadap PAD karena merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.3
Data Laju Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017
(Dalam Persentase)

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017

Dilihat dari Tabel 1.3 pada data laju inflasi di Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir pada tahun 2015 laju inflasi sebesar 2.73 persen, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2.75 persen. Dan kemudian inflasi mengalami kenaikan kembali yang cukup tinggi dan itu terjadi pada tahun 2016 sebesar 3.61 persen.



Gambar 1.4
Data Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017
(Dalam Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017

Pada data Jumlah Penduduk di provinsi Jawa Barat, pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan yang terus meningkat. Penurunan Jumlah Penduduk yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu dari 46.709.509 dan mengalami kenaikan mencapai 47.379.389. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 48.378.827.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang PAD di Provinsi Jawa Barat dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul ‘*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Barat (Periode Tahun 2002-2017)*’

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber pemikiran guna menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu pemerintah daerah khususnya menyangkut kajian – kebijakan keuangan daerah
2. Bagi aspek praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi variable ekonomi makro Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan data-data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan febuari 2019 sampai dengan mei 2019 diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, analisis data, penyusunan skripsi dan sidang skripsi. Berikut matriks jadwal penelitian ini:

Tabel 1.1
Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Keterangan	Bulan															
	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■														
Pengumpulan Data	■	■	■													
Pembuatan Usulan Penelitian	■	■	■	■	■	■	■									
Seminar Usulan Penelitian								■								
Revisi Usulan Penelitian								■	■	■						
Analisis Data									■	■	■					
Penyusunan Skripsi										■	■	■	■	■	■	
Sidang Skripsi																■